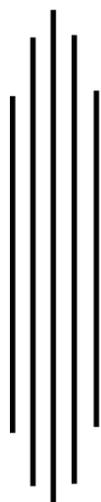




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2014



PANGKALPINANG
2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam kerangka teknis Penyusunan Renja SKPD 2014 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara maka diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan perencanaan serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan provinsi khususnya di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014. Renja SKPD berisi Kebijakan Umum SKPD serta Program/Kegiatan Pembangunan di Lingkungan SKPD baik yang dilaksanakan oleh SKPD maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004, juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD. Renja ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja SKPD memuat analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan- Peraturan yang menjadi Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 3 Seri A);

25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh, adalah penjabaran Renstra tahun 2007 – 2012 dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2014.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja SKPD) Dinas Komunikas dan informatika provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2014.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten/Kotab serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. SISTEMATIKAN PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan dan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2014) dan prakiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2014), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerinth Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional serta SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2012 - 2017

3.1. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DAN STRATEGI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berisikan penjelasan mengenai factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan , pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2011

5.1. MATRIKS RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

Menggambarkan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan , dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014.

Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi input (masukan), outcome (hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak). Indikator tersebut dapat berupa dana, SDM, laporan, buku, dan indikator lain. Penetapan indikator kinerja ini diikuti oleh penetapan besaran indikator dari masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Secara umum pada tahun 2013, Dinas Komunikasi dan Informatika hanya melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib komunikasi dan informatika dengan menyelenggarakan 5 (lima) program dan 37 kegiatan antara lain: Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, serta Program Kerjasama Informasi dan Mass Media. Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013.

2.1.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2013, Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Induk sebesar Rp. 9.749.477.479,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.971.649.604,00 sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.777.827.875,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2013, Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp.7.064.315.175,00 (mengalami kenaikan sebesar Rp1.286.487.300,00) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp3.971.649.604,00 dan belanja langsung sebesar Rp.. 7.064.315.175,00. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 6.370.633.784,00 atau 90,18%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 693.681.391,00 (0,18%). Adapun perincian uraian belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.1.1.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.971.649.604,00	3.971.649.604,00	100,00	3.206.332.225,00	80,73	765.317.379,00	0,18

A	GAJI DAN TUNJANGAN	1.447.842.630,00	1.447.842.630,00	100,00	1.463.722.460,00	80,42	15.879.830,00	10,01
B	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1.076.180.000,00	1.076.180.000,00	100,00	963.107.799,00	72,40	113.072.201,00	22,65

Tabel. 2.1.1.2.
Realisasi Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
II.	BELANJA LANGSUNG							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.086.800.000	1.086.800,00	100	1.340.237.875,00	86,72	149.020.005	15,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.850.000	24.850.000	100	20.033.400	80,62	4.816.600	7,32
2	Honorarium Pegawai Honorer// tidak tetap	16.250.000	16.250.000	100	-	100	-	
3	Belanja Perangko, Materai	8.600.000	8.600.000	100	3.783.400	78,54	4.816.600	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	48.000.000	100	254.114	0,53	47.745.886	99
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	195.280.000	195.280.000	100	151.752.500	77,71	43.527.500	7,67
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69.240.000	69.240.000	100	69.240.000	100	69.240.000	100
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	55.149.900	55.149.900	100	54.552.000	98,92	597.900	2,8
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	29.325.000	29.325.000	100	25.475.000	86,87	3.850.000	13
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.282.975	80.282.975	100	80.208.500	99,93	54.475	0,07
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.000.000	33.000.000	100	12.995.000	39,38	20.005.000	60
9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.465.000	9.465.000	100	2.810.000	29,69	6.655.000	70
10	Kegiatan Penyediaan	24.840.000	24.840.000	100	22.217.000	89,44	2.623.000	10

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
11	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.200.000	21.200.000	100	20.659.500	97,45	540.500	0,03
12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	55.500.000	55.500.000	100	21.646.000	39	33.854.000	61
13	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	638.150.000	638.150.000	100	627.445.700	98,32	107.704.000	0,02
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.250.00	17.250.00	100	14.350.000	83.19	2.900.000	0.07
14	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	17.250.000	17.250.000	100	14.350.000	83.19	2.900.000	0.07
II	Program Peningkatan disiplin Aparatur	77.860.000	77.860.000	100				
15	Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	41.510.000	41.510.000	100	36.100.000	86.97	5.410.000	0,04
16	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	36.350.000	36.350.000	100	30.400.000	83,63	5.950.000	0,04
III	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.627.655.000						
17	Kegiatan Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, dan media Baleho	299.900	299.900	100	281.120.000	93,74	18.780.000	0,06
18	Kegiatan PengadaanKoneksi Bandwidth	471.200.000	471.200.000	100	424.216.985	90.03	46.983.015	0,10
19.	Kegiatan Perbaikan dan Perawatan Jaringan	63.100.000	63.100.000	100	63.100.000	100	63.100.000	100
20.	Kegiatan Pengelolaan dan Oprasional Stasiun Radio, Media Centre dan Mobil Unit	295.930.000	295.930.000	100	275.450.535	93,08	20.479.465	0,07
21	Kegiatan Penyebaran Komunikasi dan Informasi Melalui Tatap Muka	102.150.000	102.150.000	100	76.982.150	75,36	25.167.850	0,25
22.	Kegiatan Penyediaan Jasa Hosting	30.700.000	30.700.000	100	28.250.000	92,02	2.450.000	0,08
23.	Kegiatan Pemeliharaan dan Updating Website Provinsi	104.190.000	104.190.000	100	51.544.000	49,47	52.646.000	50
24	Kegiatan Rapat	169.610.000	169.610.000	100	154.857.200	99,49	14.752.800	0,051

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	Koordinasi Bidang Aptel dan Pengelolaan Data Pusat dan Daerah							
25	Kegiatan Pengadaan Peralatan Server	252.600.000	252.600.000	100	227.010.500	89,97	25.589.500	0,10
26	Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengembangan Aplikasi dan Telematika	177.600.000	177.600.000	100	176.700.000	99,94	900.000	0,06
27	Kegiatan Pengadaan Pengelolaan dan Oprasional Majalah Kominfo	50.000.000	50.000.000	100	46.162.500	92,33	3.837.500	0,07
IV	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	334.022.300						
28.	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi	197.890.000	196.815.000	100	196.815.000	99,46	1.075.000	0,06
29	Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi	136.132.300	136.132.300	100	105.254.600	77,32	30.877.700	0,22
V.	Program Fasilitasi Peningkatan Bidang Komunikasi dan Informatika	68.620.000	-					
30	Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Website Content Management System (CMS)	68.620.000	68.620.000	100	49.228.600	71,74	19.391.400	0,39
31	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	218.170.000	218.170.000	100	202.445.000	92,79	15.725.000	0,08
32	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah	909.000.000	909.000.000	100	908.070.000	99,90	930.000	0,01
33	Kegiatan Hari Pres Nasional	265.000.000	265.000.000	100	244.155.100	92,13	20.844.900	0,08
34	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Elektronik	206.000.000	206.000.000	100	205.000.000	99,52	1.000.000	0,06
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		3.971.649.604.	3.971.649.604	100	3.206.332.225	89,02	992.628.387	0,11
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		7.064.315.175	7.064.315.175	100	6.370.633.784	90,18	693.681.391	0,98
JUMLAH BELANJA		11.035.964.779	11.035.964.779	100	9.576.966.009	86,78	1.456.998.770	7,22

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD sebesar Rp. 1.290.237.875,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2013, anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp. 1.340.237.875,00 (mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.000.000,00) dengan 17 (tujuh belas) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 1.243.038.714,00 (90,18%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 97.199.161,00 (7,2%).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan kebutuhan belanja meterai dan belanja paket pengiriman SKPD selama 12 bulan.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening telepon 1 (satu) bulan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa sopir selama 13 bulan, belanja jasa service, belanja suku cadang dan belanja BBM kendaraan selama 12 bulan serta belanja STNK kendaraan operasional sebanyak 9 (sembilan) unit.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan dan kegiatan SKPD selama 12 bulan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor sebanyak 2 (dua) orang dan

petugas keamanan kantor sebanyak 1 (satu) orang selama 13 bulan serta belanja peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja SKPD selama 12 bulan.
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan.
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.
9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.
10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya 3 Lap Top, 3 Printer dan 2 UPS selama 12 bulan.
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar harian dan majalah bulanan selama 12 bulan.
12. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan air mineral isi ulang dan dan penyediaan isi ulang tabung gas selama 12 bulan.
13. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan makan minum rapat dan makan minum tamu selama 12 bulan.
14. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur pada APBD sebesar Rp. 17.250.000,00 Pada APBD dengan satu (1) Kegiatan kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.14.350.000 atau 83 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.900.000 atau 0,17 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur adalah Lancarnya aktivitas perkantoran diskominfo.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

15. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dapur.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Disiplin aparatur pada APBD sebesar Rp. 77.860.000,00 Pada APBD dengan satu (1) Kegiatan kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.66.500.000 atau 83 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 11.360.000 atau 0,17 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur adalah Lancarnya aktivitas perkantoran diskominfo.

16. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Baju seragam yang pakaian dinas harian dan pakaian batik mingguan.

17. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Hari- Hari Tertentu

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Baju seragam Korpri dan seragam Olahraga Senam.

D. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada APBD sebesar Rp. 3.516.980.000,00,- anggaran menjadi Rp. 3.627.655.000,00 (mengalami penambahan/pengurangan sebesar Rp. 110.675.000,- dengan tiga belas (13) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.3.518.196.370 atau 83 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 11.360.000 atau 0,17 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Pengembangan

Komunikasi dan Informasi dan Media Massa adalah Terwujudnya Penyebaran Informasi Daerah.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

18. Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Baleho

Output dari kegiatan ini tersedianya Slide baleho, spanduk dan umbul-umbul.

19. Pengadaan Koneksi Bandwidth Internet

Output dari kegiatan Tersedianya koneksi bandwidth 8 MB

20. Perbaikan dan Perawatan Jaringan

Output dari kegiatan terlaksananya perbaikan perawatan jaringan internet dan tower hotspot.

21. Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio, Media Center dan Mobil Unit.

Output dari kegiatan Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah melalui in radio media center dan mobil unit.

22. Kegiatan Penyebaran Komunikasi melalui Tatap Muka

Output dari kegiatan Terlaksananya pemahaman masyarakat akan program pembangunan.

23. Kegiatan Penyediaan Jasa Hosting

Output dari kegiatan Tersedianya Hosting servis untuk kepentingan Pemprov.

24. Kegiatan Pemeliharaan dan Updating Website

Output dari kegiatan tersedianya Website Provinsi kep. Babel yang up to date.

25. Kegiatan Persiapan Pendirian TVRI Bangka Belitung

Output dari kegiatan Pelaksanaan pendirian dan Operasionalisasi TVRI BABEL.

26. Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang APTEL dan Pengelolaan Data Pusat dan Daerah

Output dari kegiatan terlaksananya RAKOR pengelolaan data dan dukungan pengolahan data pusat dan daerah.

27. Pengadaan Peralatan Server

Output dari kegiatan tersedianya peralatan server.

28. Kegiatan Peralatan Pengembangan Aplikasi dan Telematika
Output dari kegiatan Tersedianya peralatan pengembangan aplikasi dan telematika.

29. Pengelolaan dan Oprasional Majalah Kominfo
Output dari kegiatan terbitnya majalah KOMINFO selama dua (2) bulan.

30. Kegiatan Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung TVRI
Ouput dari kegiatan tidak terlaksan, dikarena tidak cukup waktu.

E. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Penkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi pada APBD sebesar Rp. 68.620.000,00 Pada APBD dengan satu (1) Kegiatan kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. . 49.228.600.00 atau 83 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 19.391.400 atau 0,17 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi Sarana adalah Terwujudnya Peningkatan SDM bidang pengelolaan data.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain:

31. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi

Output dari kegiatan Terlaksananya pengumpulan data dan Informasi pembangunan serta monev ke kabupaten/Kota.

32. Kegiatan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output dari kegiatan Terlaksananya pengumpulan data dan Informasi pembangunan serta monev ke kabupaten/Kota.

F. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi pada APBD sebesar Rp. 68.620.000,00 dengan satu (1) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.49.228.000 atau 73 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 19.392.000 atau 0,27 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Fasilitas peningkatan Sdm Bidang

komunikasi dan informasi adalah terwujudnya SDM bidang pengelolaan data.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain.

33. Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Website Content Management System (CMS)
Output dari kegiatan Terlaksananya peningkatan kualitas SDM di bidang pengelolaan website.

G. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Kerjasama informasi dan media massa Peningkatan pada APBD sebesar Rp1.598.670.000,00 dengan empat (4) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.1.560.800.100 atau 96 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 37.869.900 atau 0,4 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program kerjasama informasi dan media massa adalah terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

34. Kegiatan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Output dari kegiatan terlaksananya kerjasama dengan media elektronik daerah.
35. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
Output dari kegiatan terlaksananya kerjasama dengan mass media.
36. Kegiatan Peringatan Hari PERS Nasional
Output terlaksananya keikutsertaan dalam pelatihan di bidang komunikasi dan informasi.
37. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Elektronik Nasional
Output terlaksananya kerjasama dengan media elektronik nasional.

Sasaran yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang prima, meliputi kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - l. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - m. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Terwujudnya sarana dan prasarana dan Teknologi Informasi yang terintegritas dengan kabupaten/kota, meliputi kegiatan:
 - a. Operasionalisasi Studio Radio Mini
 - b. Operasionalisasi Mobile Community Acces Point (M-CAP)
 - c. Pengadaan Koneksi Bandwidth Internet
 - d. Fasilitasi Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - e. Perbaikan dan Perawatan Jaringan
3. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan Teknologi Informasi, meliputi kegiatan:
 - a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah
 - b. Penyebarluasan Informasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
 - c. Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Sail Belitung

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2014

Pada tahun 2014 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 5 (lima) Program dan 37 (Kegiatan). Program-program yang dilaksanakan antara lain Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin aparatur, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, serta Program Kerjasama Informasi dan Media Massa. Alokasi Anggaran untuk tahun 2014 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dari tahun 2014, walaupun belum sepenuhnya dapat membiayai kebutuhan urusan komunikasi dan informatika. Diharapkan pada tahun 2014 keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2014, baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih minimnya dukungan anggaran yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya pengembangan dan pembangunan bidang informasi, komunikasi dan teknologi (ICT) sehingga sulit untuk mencapai target kinerja SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD 20012-2017.
- 2) Masih lemahnya koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SKPD lain dalam hal sosialisasi kegiatan penyebarluasan informasi yang ada pada Diskominfo sehingga tidak banyak SKPD yang memanfaatkan kegiatan penyebaran informasi yang ada di Diskominfo.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Jalur fisik dan Komunikasi dan Informatika;

- b. Jaringan intra pemerintah yang diamankan (*Government Secured Intranet-GSI*);
- c. Pusat Manajemen Data Pemerintah (*Government Data Management Center-GDMC*);
- d. Aplikasi-aplikasi dasar untuk mendukung kegiatan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik (*Front-Office dan Back-Office*);
- e. Jaringan informasi global (*internet*).

2.1.2 Prestasi Kerja Yang Dicapai SKPD

Prestasi kerja yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para insan media dan seluruh elemen masyarakat serta mitra terkait.

Prestasi kerja yang dicapai yaitu :

- 1) Selama tahun 2010 tepatnya bulan Juli telah berdiri Studio Radio In FM Radio dengan frekwensi 96,7 FM. Peran media radio ini digunakan untuk :
 - a. Penyampaian informasi-informasi pembangunan daerah (dalam program Babel menyapa dan Info Babel)
 - b. Siaran langsung konferensi pers setiap hari senin
 - c. Terjalannya kerjasama dengan Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam acara 'Polisi Menyapa' setiap hari Rabu.
 - d. Terjalannya kerjasama dengan SKPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyampaian isu-isu aktual dalam acara '*Cerudik*'.
 - e. Terjalannya kerjasama dengan SKPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyampaian iklan layanan masyarakat.
- 2) *Media Center* ; peran media center dikembangkan dengan melakukan penyerapan informasi dari berbagai kalangan, mengolah data, analisa data kemudian pengemasan informasi yang akan disebarluaskan kepada publik dan dijadikan umpan

balik bagi pengambil kebijakan. Dalam konteks antar lembaga/instansi, media center dapat dikembangkan sebagai wahana koordinasi komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga pemerintahan dan juga masyarakat, antara lain :

a. Konferensi Pers

Konferensi Pers ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik terutama sebagai tindak lanjut terhadap UU RI Nomor 14 Tahun 2008. Konferensi pers dilaksanakan setiap hari senin Jam 10.00 WIB dengan nara sumber seluruh SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuannya untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat tentang program pemerintah melalui media cetak dan elektronik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Sarana Internet

Kemajuan teknologi informasi tidak terbatas jarak dan waktu, karena informasi apapun dapat kita peroleh dari sarana ini. Untuk menunjang sarana internet, Media Center menyediakan 5 (lima) komputer. Dalam pelaksanaannya sarana internet terbuka untuk umum.

c. Publikasi Berita, www.babelprov.go.id

Selain itu juga untuk memberikan informasi publik, Media Center meliput dan mengisi berita-berita mengenai segala kegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disini reporter dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang berperan aktif. Informasi tersebut dapat dilihat di website www.babelprov.go.id.

d. Base Camp Wartawan Media Massa

Wartawan dari berbagai media massa memanfaatkan Media Center sebagai tempat pertukaran informasi dan dapat menggunakan fasilitas sarana internet untuk meng upload berita yang mereka peroleh serta mencari informasi melalui media internet.

e. Sarana Informasi Publik

Sebagai wadah sarana informasi publik, Media Center terbuka untuk umum, baik dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Walaupun ketersediaan informasi masih sangat terbatas tetapi Media Center terbuka untuk memberi segala informasi yang memang layak untuk dikonsumsi publik.

- 3) Semakin terjalin dengan baik koordinasi dan sinkronisasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan informasi publik.
- 4) Telah terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 5)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

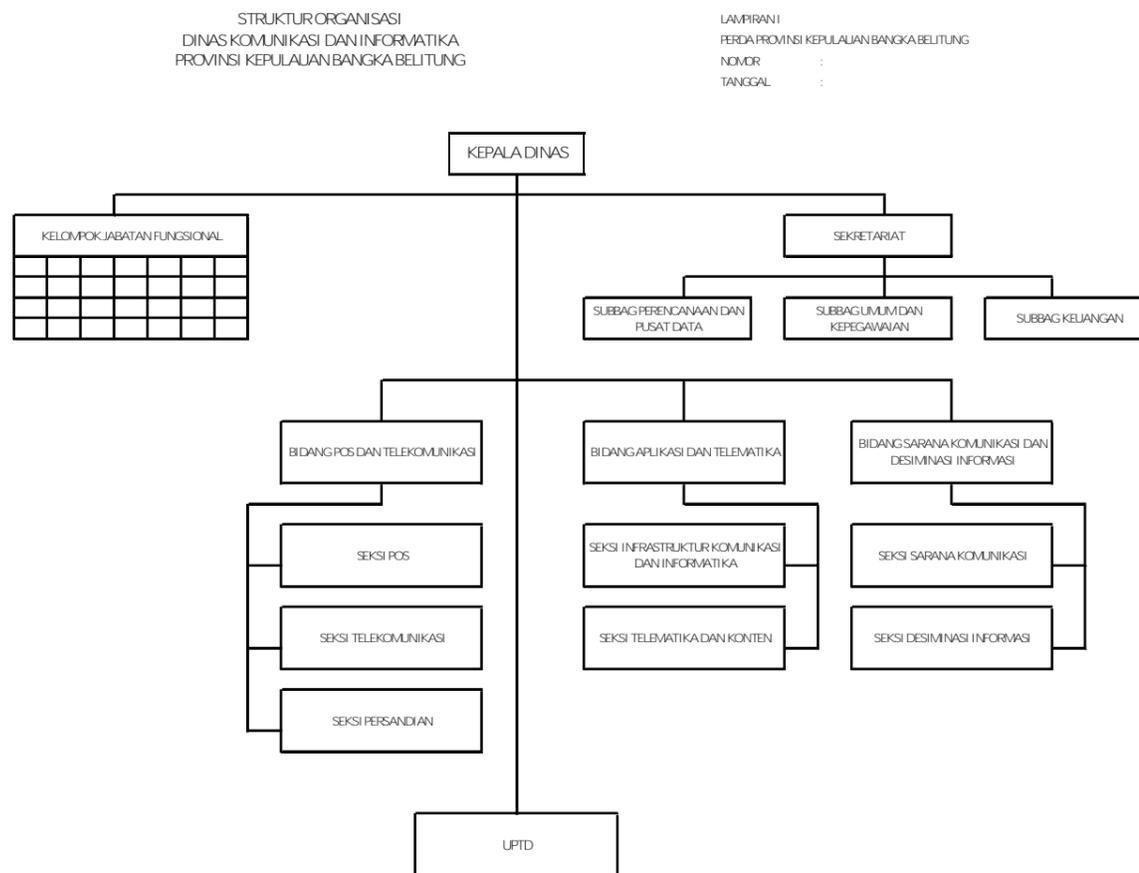
Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2007, struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) jabatan Kepala Badan yang setara dengan jabatan eselon IIa
- b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Badan yang setara dengan jabatan eselon IIIa.
- c. 3 (Tiga) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIa.
- d. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa.
- e. 6 (enam) jabatan Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang yang setara dengan jabatan eselon IVa.

Dibawah ini adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung sebanyak 53 pegawai, dengan status kepegawaian 44 PNS, 3 CPNS dan 6 orang tenaga honorer. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 30 orang, D3 sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 2 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 10 orang

Tabel 2.2.1
Klasifikasi Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
2	Pasca Sarjana/ S2	4	1	5
3	Sarjana / S1	17	11	28
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	7	4	11
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	1	1	2
8	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-

Tabel 2.2.2

Klasifikasi Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Eseloning

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	1	-	1
	II B	-	-	-
	II C	-	-	-
	II D	-	-	-
2	III A	4	-	4
	III B	-	-	-
	III C	-	-	-
	III D	-	-	-
3	IV A	7	3	10
	IV B	-	-	-
	IV C	-	-	-
7	Non Eselon	17	14	31
8	Fungsional	-	-	-
	Jumlah	29	17	46

Dilihat dari tabel diatas bahwa personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terlihat beragam dari segi golongan maupun pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi :

- (1). Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan keuangan.

Sekretariat terdiri dari;

a. Subbagian Perencanaan dan Pusat Data;

Subbagian Perencanaan dan Pusat Data mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan Dinas;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi dan administrasi kepegawaian;

c. Subbagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan anggaran, dan verifikasi serta perbendaharaan Dinas;

(2). Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan, kebijakan dan standarisasi dibidang Pos dan Telekomunikasi;

Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

a. Seksi Pos;

Seksi Pos mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring, perencanaan dan evaluasi di bidang Pos;

b. Seksi Telekomunikasi;

Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring, perencanaan dan evaluasi di bidang telekomunikasi;

c. Seksi Persandian.

Seksi Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Sandi serta mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data yang berhubungan dengan Sandi;

(3). Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Aplikasi Telematika;

Bidang Aplikasi dan Telematika terdiri dari:

a. Seksi Infrastruktur Komunikasi dan Informatika;

Seksi Infrastruktur Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang Infrastruktur Komunikasi dan Informatika;

b. Seksi Telematika dan Konten.

Seksi Telematika dan Konten mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Telematika dan Konten;

- (4). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas tertentu Dinas;
- (5). Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Meskipun telah dicapai kemajuan di bidang komunikasi dan informatika, tetap saja masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Masih minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja para pejabat yang ada seperti kendaraan operasional yang masih minim;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga ada beberapa tupoksi yang berjalan di tempat.

Permasalahan-permasalahan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang optimal.

Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar tinggal di pedesaan dan pada umumnya memiliki keterbatasan dalam bidang Komunikasi dan Informasi.

Adapun tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi pengembangan jaringan komunikasi antar daerah yang efektif sebagai infrastruktur dasar dalam menunjang alih pengalaman dan data sumber daya antar daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penyusunan media informasi berbasis teknologi informasi guna menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Penyusunan sistem informasi dan komunikasi secara bertahap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang pengambilan keputusan;
4. Penelitian dan pengembangan inovasi pelayanan masyarakat di daerah Provinsi, Kabupaten/kota dengan berbasis teknologi informasi.

Adapun isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Bidang Pos dan Telematika
2. Pemanfaatan Bidang Aplikasi dan Telematika
3. Pemanfaatan Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
4. Penggunaan TIK dalam proses bisnis dan peningkatan pelayanan pada masyarakat

BAB III

RENCANA STRATEGIS DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN

2012-2017

3.1. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 – 2017

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari pengertian visi tersebut, maka visi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dirumuskan sebagai berikut: "Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Cyber Islands".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di rumuskanlah Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
2. Memperluas akses jaringan informasi dan komunikasi masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya teknologi informasi.
5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi penyelenggaraan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan secara komprehensif, efektif dan sinergis. Dengan arah

kebijakan yang tepat sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan serta pengembangan komunikasi dan informatika, maka rumusan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2012-2017 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal. Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu negara, pebisnis dan masyarakat. Pemberian hak penggunaan sumberdaya tersebut pada satu sisi harus dilakukan secara selektif dengan komitmen yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; pada sisi yang lain harus dapat dialokasikan dengan cepat dan bertanggung jawab.
- b. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika. Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh masyarakat, diperlukan peran swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha oleh pemerintah sedemikian hingga tercipta pasar dengan sistem kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan masyarakat.
- c. Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan. Hubungan antar sumber dan pengguna informasi adalah berbentuk macam-macam jaringan yang tersambung satu sama lain untuk menghasilkan efisiensi layanan secara nasional. Untuk menjamin terjadinya interkoneksi jaringan dan interoperabilitas layanan diperlukan kepatuhan terhadap standar alat dan layanan beserta pengawasan terhadap praktek lapangan dalam usaha mencegah terjadinya saling-ganggu.
- d. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu

dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil (pull) pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarluaskan melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan peruntukannya.

- e. Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat. Untuk mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi diperlukan tindakan afirmatif oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, jasa dan kandungan informasi untuk daerah-daerah yang kurang layak secara ekonomis bagi penyelenggara. Usaha-usaha pembangunan kapasitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian yang terkait erat dengan pembangunan fisik untuk mencapai tingkatan nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi sosial. Dalam hal ini peran lembaga komunikasi sosial didorong dan dikembangkan melalui pendekatan kearifan lokal.
- f. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kekhasan Indonesia untuk peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan dengan melihat pada permasalahan yang dihadapi dan strategi penyelesaian yang menguntungkan bangsa dan negara.
- a. Mendorong industri TIK dalam negeri. Untuk menjamin kepentingan bangsa dan negara, penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika harus dapat dilaksanakan secara merata oleh bangsa Indonesia dengan cara mengembangkan industri perangkat, jasa, dan konten nasional. Dengan demikian rantai pasok kegiatan ekonomi dalam negeri terkait dengan bidang komunikasi dan informatika dapat diperpanjang, sehingga efek pengalinya bertambah besar. Hal

ini penting dalam rangka meningkatkan peran bidang komunikasi dan informatika dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari kontribusi bidang ini terhadap PDB nasional. Makin panjangnya rantai pasok dalam negeri akan dapat membuat kontribusi terhadap PDB menjadi semakin tinggi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN DAN STRATEGI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.

Sasaran

1. Terwujudnya sistem perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan dinas Kabupaten/Kota.
2. Terwujudnya Pelayanan Publik dan Administrasi perkantoran yang prima
3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
4. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik
6. Terwujudnya sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang terintegritas dengan Kabupaten/Kota
7. Terwujudnya jaringan informasi dan komunikasi masyarakat yang efektif
8. Optimalisasi kemampuan SDM dalam teknologi informasi dan komunikasi
9. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan teknologi informasi
11. Terwujudnya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik APBD maupun Dekonsentrasi sebagai rekomendasi untuk kegiatan tahun berikutnya.
12. Optimalnya koordinasi bidang teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pemerintah kota/kabupaten

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renja ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi yang akan dilaksanakan tak terlepas dari komponen utama dari suatu infrastruktur informasi elektronik yang diperlukan, diantaranya adalah:

- o Jalur fisik Komunikasi dan Informatika;
- o Jaringan intra pemerintah yang diamankan (*government secured intranet-GSI*);
- o Pusat Manajemen Data Pemerintah (*Government Data Management Center-GDMC*);
- o Aplikasi-aplikasi dasar untuk mendukung kegiatan pelayanan pemerintah dan layanan publik (*front-office* dan *back-office*);
- o Jaringan informasi global (internet).

Oleh karena itu strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana Strategis yang efektif. Butir-butir Strategi diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategi tersebut sebagai berikut :

- (1). Awakening (kebangkitan)
 - o Perubahan Pola Pikir

Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *e-Government* melalui sosialisasi/ penjelasan mengenai konsep dan program *e-Government*, serta contoh keberhasilan (*best practice*) pelaksanaan *e-Government*.

- o Siap mewujudkan *e-Government*

Penataan sistem dan proses kerja yang mampu mendukung implementasi *e-Government* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Transformasi dari sistem manual ke sistem yang berbasis teknologi informasi ini perlu menjadi agenda yang didukung oleh komitmen yang kuat dari manajemen birokrasi.

(2). Connected (terhubung)

- o Menghubungkan seluruh Kabupaten/kota sampai ke tingkat desa di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- o Kolaborasi antar seluruh Stakeholder dan unit pelayanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(3). Transparant (transparan)

- o Penerapan kebijakan melalui proses yang standar dan memiliki komitmen yang kuat
- o Transparansi proses dan informasi administrasi dalam melaksanakan standar pelayanan minimum yang optimal dan prima

(4). Intelligent (kecerdasan)

- o Peningkatan efisiensi kerja melalui penerapan layanan *e-Government* unit kerja/pelayanan
- o Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan *e-Government* unit kerja/pelayanan

(5). Volitional (kemauan)

- o Pemberdayaan dalam penerapan *e-Government* dan penyelesaian masalah Daerah melalui ketersediaan data dan informasi yang akurat, transparan dan *up to date*.

(6). Equilibrium (keseimbangan)

- o Keseimbangan sektor umum dan swasta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- o Peningkatan aksesibilitas dan penghapusan kesenjangan digital dalam masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang murah dan mudah diakses

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program- program pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

1. Kelompok Program Utama/Prioritas

- o Program Penyediaan dokumen perencanaan.
- o Program Pelayanan Administrasi.
- o Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Daerah.
- o Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa
- o Program Pelayanan Administrasi perkantoran
- o Program Peningkatan disiplin Aparatur
- o Program Peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
- o Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
- o Program Fasilitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- o Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
- o Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- o Program Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan
- o Program penyempurnaan dan pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi
- o Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

- o Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- o Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika
- o Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika.
- o Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Kelompok Program Pendukung/Penunjang

- a. Program Penerapan Pemerintahan yang baik.
- b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas aparatur Negara.
- c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- d. Program pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur.
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.
- f. Program Pendidikan Kedinasan.

BAB IV
RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2014

5.1. MATRIKS RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2014

Di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penyusunan dokumen perencanaan tahun SKPD tersebut telah melalui tahapan – tahapan, yaitu:

1. Telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.
2. Telah dijabarkannya RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 ke dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.
3. Telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun

Di bawah ini tabel Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2014

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR		LOKASI KEGIATAN	JUMLAH DANA
		TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		

1	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media				6,351,000,000
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	terlaksananya kerjasama dengan media informasi	Bangka Belitung	995,000,000
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyebaran informasi pemabangunan daerah	terlaksananya kerjasama dengan media informasi	Bangka Belitung	356,000,000
	Pengelolaan dan Operasional TVRI Bangka Belitung	Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya penguatan TVRI di Bangka Belitung	Provinsi Bangka Belitung	5,000,000,000
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa				16,330,379,000
	Penyediaan jasa hosting	Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui hosting services	tersedianya hosting services untuk kepentingan Pemerintah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38,300,000
	Pembangunan Infrastruktur Jaringan pesisir dan pulau terpencil	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi	tersedianya titik Hot Spot di daerah pesisir dan pulau terpencil	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,171,960,000
	Penyediaan jasa koneksi bandwidth internet	Terlaksananya kelancaran komunikasi jaringan internet provinsi	Tersedianya bandwidth 24 Mbps	Instansi Pemerintah Daerah	763,700,000
	Operasionalisasi Mobile Community Acces Point (M-CAP)	Terwujudnya upaya pengentasan kesenjangan digital di Bangka Belitung	Terlaksananya operasional mobile comunity acces point	7 kabupaten/kota	135,590,000
	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Hot Spot	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi	tersedianya titik-titik Hot Spot di 7 kab/kota	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,182,140,000
	Pengadaan peralatan Server/NAS	Meningkatnya efektifitas pelayanan informasi	tersedianya peralatan Server/NAS	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	403,800,000
	Pembangunan Jaringan VPN IP 7 kabupaten/kota	Terwujudnya koneksi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota	Terlaksananya pembangunan jaringan teresterial regional di 7 kab/kota	Pangkalpinang, kab. Bangka dan Kab Bangka Tengah	848,700,000
	Pengadaan Peralatan NOC	Peningkatan kelancaran komunikasi data antar SKPD	tersedianya peralatan jaringan NOC	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	253,300,000
	Operasionalisasi website babelpro.go.id	Terpublikasinya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai arah prioritas pembangunan daerah secara up to sate	Terlaksananya pemahaman masyarakat akan program-program pembangunan sesuai arah prioritas secara cepat dengan jangkauan yang luas	Bangka Belitung	450,000,000
	Penyebaran komunikasi dan informasi melalui tatap muka	Terlaksananya penyampaian informasi pembangunan daerah kepa da masyarakat	Pemahaman masyarakat terhadap pembangunan daerah	Bangka Belitung	400,000,000

	Peningkatan informasi pelayanan masyarakat	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dan peningkatan partisipasi publik	akuntabilitas dan transparansi dan peningkatan partisipasi publik	Bangka Belitung	400,000,000
	Penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah daerah	Terlaksananya penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat luas	Adanya pengertian dan pemahaman masyarakat akan program dan kegiatan pemerintah daerah	Bangka Belitung	2,470,000,000
	Pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan melalui KIM	Tersedianya informasi pembangunan daerah melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Bangka Belitung	550,000,000
	Pengembangan regulasi bidang pos di 7 kabupaten/kota Provinsi Bangka Belitung	Terwujudnya peningkatan SDM bidang Pos dan Telekomunikasi	Terlaksananya peningkatan SDM bidang Pos dan Telekomunikasi	Bangka Belitung	206,155,000
	Bimtek Pos dan Jasa Titipan	Terwujudnya SDM bidang Pos dan Telekomunikasi	peningkatan SDM bidang Pos dan Telekomunikasi	Bangka Belitung	93,540,000
	Pengadaan peralatan Monitoring sinyal Telekomunikasi Tetap dan Bergerak	Terlaksananya monitoring sinyal telekomunikasi tetap dan bergerak	Tersedianya alat monitor sinyal telekomunikasi	Pangkalpinang	117,000,000
	Peningkatan Kapasitas SDM dan sarana prasarana persandian	Terwujudnya aparatur sandi yang berkualitas dan kamar sandi yang representatif	Terlaksananya peningkatan SDM persandian dan pengadaan Alat Persandian Utama (APU)	Instansi Pemerintah Daerah	234,645,000
	Pembinaan dan pengawasan koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda)	Terwujudnya komunikasi sandi antar instansi di wilayah Provinsi Bangka Belitung	Terlaksananya komunikasi sandi antar instansi di wilayah Provinsi Bangka Belitung	Bangka Belitung	176,009,000
	Pembangunan Call Center	Tersedianya Call Center yang terintegrasi dengan pusat informasi, layanan VOIP, SMS Gateway, Internet dan contact internet	terselenggaranya Call Center yang representatif	Pangkalpinang	507,000,000
	Pengadaan peralatan jaringan LAN dan WAN	Terselenggaraanya penyediaan peralatan jaringan LAN dan WAN	tersedianya peralatan jaringan LAN dan WAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5,811,280,000
	Pengembangan Portal Induk dan Updating Pusat Informasi Provinsi Kep. Bangka Belitung	tersedianya data pusat informasi yang muktahir	data pusat informasi	Pangkalpinang	75,900,000
	Updating Pusat Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Basis Data Pembangunan daerah	Pusat Informasi Daerah	Pangkalpinang	41,360,000
3	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Pengumpulan data dan informasi			2,140,093,000
	Pengumpulan data dan informasi Kominfo	Terkumpulnya data-data informasi pembangunan	terlaksananya pengumpulan data dan informasi	Bangka Belitung	395,000,000
	Rapat Koordinasi Masalah Pos dan Telekomunikasi Diskominfo	Terwujudnya koordinasi dan sosialisasi tentang telekomunikasi	rumusan masalah dan risalah telekomunikasi	diskominfo	60,160,000

	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Terlaksananya pengawasan pengawasan terhadap penggunaan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Pengawasan kegiatan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Bangka Belitung	66,420,000
	Pendataan penunjang aspek pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi	Tersedianya data penunjang pelayanan Pos dan Telekomunikasi	data penunjang pelayanan Pos dan Telekomunikasi	Instansi Pemerintah Daerah	46,860,000
	Sertifikasi SDM Pengelola TI pada Instansi Pengelola Infokom Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sertifikasi SDM pengelola IT pada instansi pengelola infokom	Meningkatnya SDM bidang IT	tersedianya tenaga IT yang berkualitas	198,000,000
	Pelatihan IT bagi SDM Pengelolaan IT Provinsi	Tersedianya SDM IT yang berkualitas	Pelatihan SDM bidang Teknologi Informasi	Bangka Belitung	242,458,000
	Penyusunan Standar Operasional & Prosedure (SOP) Tata Kelola IT Pemerintah	Tersusunnya SOP tata kelola IT Pemerintah	SOP tata kelola IT Pemerintah	Pangkalpinang	105,000,000
	Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi	Tersusunannya Rencana Induk Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi	Tersedianya Rencana Induk Percepatan pengembangan E-Gov Provinsi	Pangkalpinang	509,880,000
	Penyusunan rencana Kerja Strategis Berbasis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Diskominfo	Terwujudnya kerjasama antara Diskominfo Provinsi dengan kabupaten/kota	Terlaksananya rencana kerja strategis berbasis PPRG	Bangka Belitung	193,215,000
	Pengumpulan data dan informasi Kominfo	Peningkatan terhadap perencanaan pembangunan Provinsi	Terlaksananya pengumpulan data kominfo	Bangka Belitung	161,700,000
	Monitoring dan Evaluasi	Meningkatnya perencanaan pembangunan provinsi	terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kominfo	Bangka Belitung	161,400,000
4	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika				1,149,030,000
	Optimalisasi peran humas menuju good governance dan clean governance	Tercapainya good governance dan clean governance	Terlaksananya aktivitas pemerintahan yang baik	Bangka Belitung	990,000,000
	Rapat Koordinasi Forum SKPD Diskominfo	Terlaksananya rapat koordinasi forum SKPD Kominfo antara Provinsi dan kabupaten/kota	lancarnya koordinasi kegiatan kominfo di wilayah Provinsi Bangka Belitung	Bangka Belitung	159,030,000
TOTAL					25,970,502,000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.